



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Kliping Media Online

Ekonomi

Jumat, 2 Desember 2022



**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TUP
Perpustakaan & Kearsipan
Jakarta, Bappenas
2022**

Daftar Isi

1. PENCAPAIAN TARGET SDGS MELAMBAT – *Media Online Kompas*
2. PROSPEK PASAR MODAL INDONESIA 2023 – *Media Online Kompas*
3. KONSISTENSI JANGKAR INFLASI – *Media Online Bisnis Indonesia*
4. DERU NYARING EKONOMI DAERAH – *Media Online Bisnis Indonesia*
5. KUDA-KUDA SILPA NEGARA – *Media Online Bisnis Indonesia*

Pencapaian Target SDGs Melambat

Berdasarkan laporan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2022, pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan melewati tahun 2030. Artinya, pencapaian SDGs tahun 2030 akan bergeser.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu yang penting meskipun saat ini setiap negara masih diterpa oleh berbagai tekanan, seperti pandemi dan krisis lainnya. Tekanan tersebut bahkan membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di kawasan Asia Pasifik melambat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dalam acara konferensi tahunan bertajuk "Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs" di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Berdasarkan laporan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2022, pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan melewati tahun 2030. Jadi, target SDGs tahun 2030 akan bergeser," ujarnya.

Selain pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan geopolitik, kata Suharso, pencapaian SDGs juga menghadapi tiga krisis yang mengancam masa depan Bumi dan manusia. Tiga krisis yang mengancam tersebut adalah perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan laporan Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2022, sebanyak 50-75 persen populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada 2100. Di sisi lain, ancaman lainnya datang dari polusi udara karena tercatat sebagai salah satu pe-

nyebab hingga 4,2 juta kematian setiap tahun.

Sementara krisis dari hilangnya keanekaragaman hayati juga dapat mengancam pangan, kesehatan, dan jasa ekosistem. Panel Kebijakan-Ilmu Antarpemerintah tentang Layanan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (IPBES) tahun 2019 melaporkan bahwa sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan akan menghadapi ancaman kepunahan akibat krisis ini.

Dampak dari berbagai krisis tersebut juga telah dialami Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang 2011-2021. Bahkan, Bappenas mencatat, potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat dampak perubahan iklim dapat mencapai Rp 544 triliun apabila tidak ada intervensi kebijakan yang diambil.

Suharso menyatakan, kebutuhan dana untuk mencapai SDGs menurun akibat berbagai krisis yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dukungan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku ekonomi.

"Dalam pertemuan negara G20, para pemimpin berkomitmen untuk mempercepat pencapaian SDGs. Setiap negara juga berkomitmen mengisi gap atau kekurangan dana pencapaian SDGs, khususnya dalam rangka menangani perubahan iklim," tuturnya.

Suharso menekankan, pemulihan dari pandemi Covid-19 menjadi sarana untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan akselerasi pe-

ngurangan emisi gas rumah kaca dan mempercepat bauran energi terbarukan yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Presiden memberikan arahan agar target SDGs tetap harus dicapai meskipun terdampak pandemi. Aksi nyata dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan dalam rangka akselerasi ini, terutama yang didukung oleh penguatan regulasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs," ujarnya.

Strategi baru

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga Menteri Riset dan Teknologi 2019-2021 Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, tahun ini menjadi periode yang sangat krusial dalam pencapaian SDGs. Sebab, waktu pencapaian SDGs ini hanya tinggal tujuh tahun dan sempat mengalami tantangan akibat pandemi selama dua tahun terakhir.

"Dari 17 poin tujuan SDGs, terdapat beberapa poin yang barangkali bisa menjadi perhatian kita. Namun, yang lebih penting sekarang di tengah keterbatasan waktu ini adalah harus ada strategi dan model bisnis baru dalam mencapai setiap poin SDGs," ujarnya.

Menurut Bambang, salah satu strategi atau solusi alternatif percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui upaya transformasi ekonomi digital. Sebab, kekuatan teknologi digital telah terbukti membuat

perekonomian mampu bertahan dan pulih dari kontraksi terdapat di tahun 2020 atau saat awal pandemi.

Sejumlah lembaga seperti Google, Temasek, dan Bain tahun 2021 memproyeksikan valuasi ekonomi digital Indonesia setiap tahun akan terus meningkat hingga mencapai 146 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.248 triliun pada 2025. Sementara Kementerian Perdagangan juga memproyeksikan valuasi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh hingga mencapai 315 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 4.531 triliun pada 2030.

"Kebanyakan sektor ekonomi Indonesia yang saat ini masih konvensional nantinya akan bergerak dengan berbasis digital. Bila dibandingkan negara lain, khususnya di ASEAN, potensi ekonomi Indonesia paling besar meskipun *market* kita juga memang terbesar," katanya.

Koordinator Perwakilan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia Valerie Julliand mengakui bahwa semua negara di dunia tengah menghadapi berbagai krisis. Namun, ia juga mengapresiasi upaya Indonesia yang terus memacu percepatan pencapaian target SDGs.

"Di tengah pandemi Covid-19, kita tetap membutuhkan upaya yang lebih besar dalam pencapaian target SDGs. Upaya mencapai target SDGs ini harus lebih maju karena hasil COP27 (Konferensi Perubahan Iklim ke-27) belum menghadirkan komitmen yang diharapkan dalam mengatasi perubahan iklim," katanya. (MTK)

Prospek Pasar Modal Indonesia 2023

Hans Kwee

Co-Founder PasarDana dan Dosen Magister Aima Jaya dan Trisakti

Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia 2023 adalah yang terlemah sejak 2001, di luar masa pandemi Covid-19. IMF memperkirakan beberapa negara akan gagal membayar utang dan terjebak dalam jurang resesi.

Bank Dunia menyatakan ada risiko resesi global dan krisis keuangan negara berkembang di 2023 akibat kebijakan beberapa bank sentral seluruh dunia menaikkan bunga acuan.

Potensi krisis 2023 tak lepas dari sejumlah faktor, seperti perang Rusia-Ukraina, dampak gangguan pascapandemi, dan perubahan iklim. Dampak pandemi masih terasa dengan terganggunya rantai pasok barang dan jasa. Ini menimbulkan kelangkaan pasokan yang mendorong *cost push inflation* (inflasi yang didorong sisi penawaran).

Di sisi lain, kembali di bukannya ekonomi pascapandemi mendorong masyarakat berbelanja. Perusahaan kembali beroperasi normal dan mulai melakukan belanja modal. Ini juga mendorong naiknya inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*).

Pandemi belum benar-benar selesai, perang Ukraina-Rusia pecah dan membuat ketidakstabilan di kawasan Eropa dan dunia. Perang membuat gangguan pasokan, terutama komoditas yang dihasilkan kedua negara. Sanksi yang dikenakan negara Eropa kepada Rusia cenderung berbalik merugikan pemberi sanksi dan memperburuk kondisi perekonomian.

Hasilnya, banyak harga komoditas naik, terutama komoditas energi yang memperparah inflasi yang sudah tinggi. Inflasi tinggi memaksa bank sentral sejumlah negara berlomba-lomba menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

Dampak kenaikan suku bu-

nga membuat kurva imbal hasil (*yield curve*) berbagai tenor mengalami kenaikan sehingga biaya pinjaman naik. Dengan *cost of fund* yang lebih mahal, banyak proyek menjadi tidak *visible* untuk diambil dan memperlambat perekonomian.

Kenaikan bunga tampaknya tak mudah menjinakkan inflasi, tapi cenderung mendorong ekonomi ke jurang resesi. Ini yang dikenal sebagai stagflasi: inflasi tinggi, tapi ekonomi resesi. Di sisi lain ketika ekonomi global menghadapi krisis, uang akan lari ke instrumen yang aman (*safe haven*) dan kembali ke negara yang dianggap aman, salah satunya AS. Itu sebabnya, indeks dollar AS begitu perkasa tahun ini dan rupiah melemah.

Prospek Indonesia

Dari uraian di atas terlihat memang benar ekonomi global menghadapi ancaman krisis ekonomi di 2023. Pertanyaannya, seberapa gelap ekonomi dan pasar modal Indonesia di 2023? Bagaimana prospek pasar modal Indonesia di tengah risiko krisis ekonomi global?

Jangan terlalu khawatir. Ekonomi *emerging market* (EM), khususnya Indonesia, terbukti tangguh beberapa tahun terakhir dalam menghadapi badai krisis. Pada 2020 dunia menunggu potensi *chaos* sistem perawatan kesehatan di EM yang terbatas dan kebijakan yang tak efektif dalam menghadapi Covid-19. Namun, keduanya tak terbukti. EM (termasuk Indonesia) bisa melewati pandemi dan ekonomi pulih cepat.

Di sektor keuangan, kebijakan yang diambil OJK terbukti mampu menenangkan pasar keuangan. Kebijakan sektor keuangan terbukti mampu menopang sektor riil dan perekonomian nasional sehingga terhindar dari krisis.

Perang Rusia-Ukraina yang

dimulai Februari 2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan multipolaritas dan potensi risiko geopolitik. Investor global akan mendiversifikasi portofolio dan pindah ke negara "netral" yang dapat menguntungkan. Indonesia salah satu negara netral yang diuntungkan oleh dampak geopolitik karena harga komoditas yang naik.

Ini terlihat dari aliran dana asing tetap masuk ke pasar saham Indonesia dan diperkirakan terus berlanjut di 2023 selama konflik belum berakhir.

Di 2023 diperkirakan harga komoditas masih tinggi. Selain karena dampak perang dan gangguan pasokan, juga karena persediaan komoditas global saat ini hanya 64 hari, lebih pendek dibandingkan 70 hari setahun lalu, dan 76 hari pada lima tahun lalu. Data menunjukkan nilai komoditas yang dikonsumsi secara global telah naik dari 6,3 triliun dollar AS (2019) menjadi 12,5 triliun dollar AS, atau dari 6 persen menjadi 13 persen dari PDB dunia.

Pasar saham biasa jadi indikator utama untuk memprediksi resesi dan krisis. Ketika sebuah negara berpotensi mengalami resesi atau krisis, pertumbuhan ekonomi turun dan berdampak pada penjualan perusahaan, dan laba akan turun. Akibatnya, harga saham akan terkoreksi akibat *price earning ratio* (PER) mahal.

Terbukti mayoritas EM, khususnya Indonesia, tak menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi yang signifikan di 2022. IHSG sebagai indikator utama perekonomian Indonesia masih tumbuh positif, menandakan mayoritas pelaku pasar percaya ekonomi Indonesia 2022 dan 2023 masih akan tumbuh dan jauh dari resesi.

Diperkirakan risiko atau potensi resesi Indonesia hanya 3 persen untuk tahun depan.

Di tengah ancaman risiko global, terlihat EM, khususnya Indonesia, mampu mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Inflasi Indonesia sempat naik pascake-naikan harga BBM subsidi, tetapi biasanya sementara.

Langkah kenaikan harga BBM subsidi juga dianggap baik untuk postur anggaran belanja pemerintah. Ini yang membuat perbedaan kebijakan antara negara maju dan negara berkembang. Terlihat negara berkembang, termasuk Indonesia, menaikkan bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar guna menghindari arus modal keluar dan *import inflation*.

Indonesia bisa keluar dari *Fragile Five*, istilah yang muncul pertengahan 2013. Tahun 2013, mata uang Indonesia bersama Afsel, Brasil, Turki, dan India dinilai rentan terhadap tekanan inflasi tinggi, defisit neraca berjalan, dan kelemahan struktur ekonomi domestik.

Namun, di 2022, rupiah sebagai mata uang Indonesia terlihat cukup kuat di tengah kenaikan suku bunga global, inflasi dalam negeri yang cukup terkendali, surplus neraca perdagangan dan struktur ekonomi yang lebih baik. Rupiah memang melemah terhadap dollar AS, tetapi masih lebih baik daripada banyak negara tetangga.

Masih sangat menjanjikan

Potensi resesi Indonesia yang rendah dan ekonomi yang masih akan tumbuh di 2023 membuat prospek pasar modal Indonesia masih sangat menjanjikan. Dana asing masih berpotensi masuk akibat beberapa alasan di atas, ditambah dana asing sempat keluar besar-besaran dari negara berkembang selama pandemi dan belum kembali pascapandemi.

Valuasi EM juga lebih rendah jika melihat sebelum dan sesu-

dah pandemi, di mana negara maju sudah diperdagangkan sebanding, sedangkan negara berkembang masih terdiskon 20 persen. Kesigapan OJK mengawal pasar keuangan menambah optimistis pasar modal.

Dari alasan di atas, prospek pasar modal Indonesia 2023 masih sangat menjanjikan. JP Morgan memilih saham-saham Indonesia untuk 2023. Ini mengkonfirmasi prospek ekonomi kita tetap cerah di 2023.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 6.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Presiden: Investasi di daerah jangan dipersulit.

Tidak dipersulit pun tidak mudah.

Eks napi nantinya tak bisa langsung maju caleg atau pilkada. Lagi pula calon lain masih banyak, kok.

Cakupan imunisasi dasar anak masih rendah. Kalau sayang anak, jangan ragu.

Mang Uiril

KONSISTENSI JANGKAR INFLASI

Tejar Ariel & Lili Sanardi
redaksi@bisnisid.com

Efektivitas kolaborasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal dalam merespons dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan rupiah mulai terasa.

Kemarin, Kamis (20/12), tingkat inflasi kembali mencatatkan penurunan selama dua bulan berturut-turut setelah melambung pada posisi tertinggi akibat kenaikan harga BBM.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi November 2022 tercatat 5,42% (year-on-year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,71% (YoY). (Lihat infografik).

Eksekusi suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), yang bersanding dengan kurucan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan menjadi ramuan mujarab penawar inflasi.

Akan tetapi, kondisi ini tidak lantas melenakan pemangku kebijakan. Pemerintah tetap memototi risiko inflasi pada 2023 sebagai dampak rembetan

dari krisis energi dan pangan global, termasuk pelemahan rupiah.

Musababnya, pelemahan rupiah yang didorong oleh *capital outflow* akibat kenaikan suku bunga acuan di bank sentral utama akan mengontrol inflasi barang impor.

Tantangan ini pun disadari betul oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo, dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, memastikan inflasi masih menjadi fokus kebijakan.

"Untuk APBN 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi," kata Kepala Negara, Kamis (12/1).

Secara konkret, Presiden menginstruksikan agar APBN 2023 menjadi instrumen perlindungan sosial masyarakat rentan, serta mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Negara pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga pergerakan inflasi melalui percepatan belanja APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menambahkan APBN 2023 didesain dengan mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu ancaman ketidakpastian ekonomi di dalam negeri.

Sejalan dengan itu, alokasi bantuan sosial pun disiaqakan dengan anggaran Rp476 triliun. "Tantangan ke depan yang berhubungan dengan pangan dan energi direspon dengan APBN," katanya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun untuk menjaga per-

ekonomian dan masyarakat di tengah harga energi yang tidak pasti, melalui subsidi dan kompensasi.

Menanggapi data indeks harga konsumen (IHK) terkini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan penurunan inflasi pada November 2022 ditopang upaya ekstra oleh seluruh pihak di tengah tingginya inflasi *administered prices*.

Airlangga menambahkan, tingkat inflasi inti yang masih di kisaran 3% menandakan permintaan masyarakat konsisten tinggi seiring dengan ekonomi yang makin kuat.

OPTIMISME MANUFAKTUR

Sementara itu, perlambatan inflasi juga menjadi angin segar bagi industri manufaktur. Sebab, kenaikan biaya yang terjadi menjadi salah satu penyebab utama penurunan permintaan pada bulan lalu.

Menurut Economics Associate Director S&P Markit Jingyi Pan, pertumbuhan manufaktur Indonesia mengalami perlambatan pada November 2022 yakni 50,3 atau lebih rendah ketimbang Oktober 2022 51,8.

Kendati demikian, Menteri Perindus-

trian Agus Gumiwang Kartasmita, optimistis manufaktur dapat terus tumbuh. Menurutnya, terdapat tiga hal yang mendukung optimisme tersebut. *Pertama*, daya beli masyarakat yang masih terjaga sebagaimana tecermin pada data inflasi.

Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru yang mendukung peningkatan pesanan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang positif pada sejumlah negara mitra pada kuartal III/2022.

Adapun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dengan perkembangan IHK hingga November 2022, tingkat inflasi pada akhir tahun sangat mungkin berada di bawah 6%.

Laju inflasi yang melandai pada periode itu, katanya, mengindikasikan bahwa tekanan yang sebelumnya sangat tinggi, terutama dipicu oleh kenaikan harga BBM, saat ini mulai mereda. "Tahun depan pun prediksi saya bisa mencapai sekitar 3%," katanya kepada *Bisnis*. *ce*

Luh Annyah/Maria Clara/Netmat Fawaz/13



Kebijakan Suku Bunga Acuan BI 2022 (%)

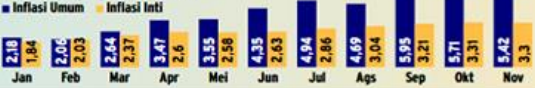
Bulan	Suku Bunga
Januari	3,50
Februari	3,50
Maret	3,50
April	3,50
Mei	3,50
Juni	3,50
Juli	3,50
Agustus	3,75
September	4,25
Oktober	4,75
November	5,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, S&P Global

Purchasing Managers' Index S&P Global 2022



Inflasi Sepanjang 2022 (% YoY)



Hlm: 1 - Kolom: Cover Depan

DERU NYARING EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi pada tahun depan diproyeksi masih cukup solid di kisaran 5% meski dihadapkan pada ancaman resesi dan inflasi alias resflasi. Kendati demikian, berbagai tantangan yang mengadang perlu langkah antisipasi guna menjaga deru ekonomi daerah pada rentang yang telah ditetapkan.

Poni Widarti, Arif Gunawan, Harian Noris Saputra, & M. Noli Hendra
redaksi@bisnis.com

Provinsi Jawa Timur misalnya yang pertumbuhan ekonomi pada 2023 diproyeksi bakal berada pada rentang 4,9% hingga 5,3%.

Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Timur Rizki E. Wilmada menilai potensi ekonomi wilayah ini ke depan masih tetap ada karena pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, investasi swasta maupun pemerintah terus bergulir, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga terus berlanjut.

"Tahun depan ada persiapan Pemilu. Ini penting. Ada Pilpres, Pileg yang serentak akan meningkatkan konsumsi terutama untuk permintaan sablon, biaya cetak kaos, makanan minuman, dan sektor MICE akan tumbuh," katanya, Rabu (30/11).

Oleh karena itu, bank sentral memperkirakan ekonomi Jatim bakal berada di rentang 4,9% hingga 5,3% yang akan ditopang oleh masinya kinerja industri, perdagangan, pertanian, dan usaha lainnya.

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa pada 2023 ada tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dari 3,8% menjadi 2,7%, khususnya di Amerika Serikat, Eropa, dan China.

"Selain itu juga ada risiko resesi karena faktor masih disrupsi mata rantai ekonomi global dan ketegangan politik berlanjut hingga respons kebijakan suku bunga yang agresif di AS," katanya.

Sementara, imbuhnya, tantangan domestik, masih seputar tantangan fiskal yang terkonsolidasi, serta normalisasi kebijakan moneter, dan bantuan sosial untuk bahan bakar minyak (BBM) tidak berlanjut tahun depan.

"Tentu ini akan mempengaruhi sisi permintaan di Jatim, yang konsumsi rumah tangganya sekitar 60%," katanya.

Oleh karena itu, dia merekomendasikan lima strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim yakni mempercepat hilirisasi agribudaya mulai dari peternakan, pertanian, dan perikanan yang dikemas dalam bentuk pangan olahan sehingga punya nilai tambah.

Selain itu, Jatim perlu meningkatkan utilisasi kawasan industri termasuk Kawasan Industri Halal (KIH), peningkatan ekspor dengan negara yang sudah ada kerja sama, menggunakan Local Currency Settlement (LCS) dalam setiap kegiatan transaksi antar negara atau bilateral, serta memperluas penggunaan QRIS.

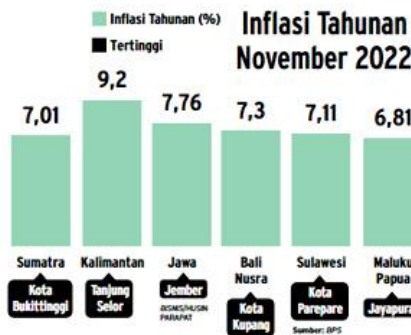
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim)/Adhy Karyono mengatakan bahwa ekonomi pada 2023 memang sulit untuk ditebak tetapi pihaknya sudah mematok pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2023



Tahun depan ada persiapan Pemilu. Ini penting. Ada Pilpres, Pileg yang serentak akan meningkatkan konsumsi.

Optimisme Daerah Masih Membunyah

Persiapan Pemilihan Umum pada tahun depan diyakini mampu mengerek konsumsi domestik guna membuka sendi-sendi sumber pertumbuhan ekonomi untuk terakselerasi.



Pertumbuhan PDRB 2022 (%)

Wilayah	Kuartal III	Kuartal II	Kuartal I
Sumatra	4,71	4,95	4,03
Jawa	5,76	5,66	5,07
Bali dan Nusa Tenggara	6,69	3,94	3,42
Kalimantan	5,67	4,25	3,21
Sulawesi	8,24	6,47	5,37
Maluku dan Papua	7,51	13,01	10,75

Komposisi PDRB 2022 (%)

Wilayah	Kuartal III	Kuartal II	Kuartal I
Sumatra	22	22,03	21,96
Jawa	56,3	56,55	57,78
Bali dan Nusa Tenggara	2,74	2,73	2,66
Kalimantan	9,42	9,09	8,29
Sulawesi	7,11	7,09	6,73
Maluku dan Papua	2,42	2,51	2,58

sebesar 5,15%.

"Iu sangat optimistis dengan potensi-potensi Jatim yang ada. Kita juga minta BI seperti apa forecast ke depan yang akan menentukan RPJMD di 2024—2029," katanya.

Optimisme daerah menghadapi ekonomi pada 2023 yang penuh tantangan juga ditunjukkan oleh provinsi lainnya.

Deputi Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau Riau Maria Cahyaningtyas memproyeksikan ekonomi wilayah ini masih akan berada di level 4% plus minus 1%.

Menurutnya, angka proyeksi tersebut dinilai akan tumbuh positif, seiring dengan perbaikan ekonomi nasional setelah pandemi.

Proyeksi ini, imbuhnya, juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Riau dalam beberapa tahun terakhir.

"Angka ini [proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023] memang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya," katanya, Rabu (30/11).

Dia mengungkapkan keyakinan bank sentral tersebut berdasarkan laporan kinerja perekonomian secara keseluruhan, di mana PDRB Riau saat ini merupakan yang terbesar pertama secara nasional di luar Pulau Jawa. Riau, lanjutnya, berkontribusi sebesar 5% terhadap PDB Indonesia.

Selain itu, daya beli masyarakat mampu dijaga dengan baik dengan pertumbuhan 4,5%. Maria pun menilai yang paling besar pengaruhnya adalah pertumbuhan ekspor dengan kenaikan lebih dari 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

STRATEGI DAERAH

Tak hanya Jawa Timur dan Riau, provinsi Bali yang motor perekonomiannya

masih didorong oleh sektor pariwisata, yang memperoleh hantaman keras dampak Covid-19, pun mematok pertumbuhan ekonomi 4,6% hingga 5,4% pada 2023.

Optimisme Bali tersebut didasarkan pada minat meningkatnya aktivitas masyarakat terutama sektor pariwisata yang diproyeksikan semakin membaik pada 2023.

Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2023 itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah strategi transformasi pariwisata dan diversifikasi ekonomi agar sektor selain pariwisata ikut bergeliat.

Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra mengungkapkan pada 2023, prioritas utama pembangunan Bali yakni sektor pariwisata dengan modernisasi pertanian, perikanan hingga penguatan industri pengolahan hasil pertanian.

Dia menambahkan sektor prioritas kedua yakni sektor kesehatan dan pendidikan dengan fokus pada pembangunan wisata medis dan pusat kebugaran di Pulau Dewata.

Bali sedang membangun Rumah Sakit Internasional Sanur yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Selain itu kami juga mendorong pendirian Universitas luar negeri di Bali agar masyarakat Bali dan Indonesia bisa kuliah di Bali tanpa harus ke luar negeri," jelasnya, Rabu (30/11).

Dewa menambahkan prioritas pembangunan ketiga yakni pembangunan digitalisasi dalam program *smart island* atau pulau pintar, dengan meningkatkan literasi digital dan implementasi digital bagi pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan mendorong percepatan transaksi digital.

Menurutnya, Bali juga memfokuskan pembangunan berbasis ramah lingkungan atau ekonomi hijau dengan pembanguan

sumber energi baru terbarukan seperti PLTS dan PLTMH.

Provinsi ini, juga tengah gencar mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Selain itu kami juga akan fokus pada peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dengan Nusa Tenggara Timur [NTT] dan Nusa Tenggara Barat [NTB] untuk meningkatkan konektivitas ekonomi Bali dan Nusa Tenggara. Bali juga berperan sebagai hub logistik udara untuk Nusa Tenggara," jelasnya.

Revitalisasi sektor pariwisata juga bakal menjadi salah fokus Provinsi Sumatera Barat guna menjaga deru mesin ekonominya di rentang 4,2% hingga 5% pada 2023.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Wahyu Purnama A. mengungkapkan dengan adanya kegiatan Visit Beautiful West Sumatera 2023 maka akan berperan besar dalam akselerasi perekonomian wilayah ini pada tahun depan.

"Saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2023 menyentuh angka 4,2% hingga 5%," katanya.

Menurutnya, ajang pariwisata tersebut abak mengerek aktivitas konsumsi dan investasi di wilayah ini. Alasannya, sejumlah kegiatan baik berskala nasional maupun lokal bakal digelar di provinsi ini. Mulai dari kegiatan di sektor pariwisata, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

"Kalau pariwisata jalan, maka UMKM, perhotelan, jasa transportasi atau *travel agent* akan bergerak. Jadi ekonomi pun akan berjalan dengan baik," jelasnya.

Untuk itu, dia berharap semua pihak mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota kompak dan berkomitmen untuk bergerak bersama memajukan perekonomian daerah pada 2023. ■

| TATA KELOLA APBN |

KUDA-KUDA SILPA NEGARA

Siasat pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal tak pernah habis. Terbaru, pemangku kebijakan mengakali keterbatasan ruang fiskal pada tahun depan dengan menumpuk sisa pembiayaan pada tahun ini.

Tegar Arief
tegararief@bisnis.com

Ortistas fiskal pun telah menyiapkan strategi penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk mengantisipasi pembekakan belanja pada tahun depan. Mitigasi risiko ini pun sejatinya cukup wajar, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dituntut untuk konsolidasi, dengan batas maksimal defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Apalagi, berbagai indikator juga menguatkan tekad pemerintah untuk menumpuk SILPA yang kemudian terakumulasi dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Pertama, tingkat inflasi yang meskipun masih cukup tinggi, berada dalam tren pelandiran sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu. (Baca halaman 1).

Kedua, penerimaan negara yang terbilang cukup prima, yakni telah terealisasi 95,4% dari target per Oktober lalu.

Pemerintah berhasil mendulang penerimaan cukup gemilang pada tahun ini, baik dari sisi pajak, bea dan cukai, pun dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketiga, keterbatasan manuver fiskal seiring dengan berakhirnya skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) pada tahun depan.

Dengan demikian, pemerintah terpaksa harus mengelola fiskal lebih mandiri, tidak seperti 3 tahun terakhir yang masih mendapatkan sokongan dari bank sentral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan aku-

mulasi SILPA menjadi opsi paling unggul untuk mendukung kewaspadaan pada tahun depan yang dihadapkan pada volatilitas di pasar keuangan hingga krisis energi dan pangan.

Indikator penumpukan SILPA pun menguat apabila menengok data belanja terkini yang cukup kontras dengan performa penerimaan negara.

Per November 2022, dari alokasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.119,5 triliun, baru terealisasi 78,2% atau Rp876 triliun. Pun dengan belanja daerah, dari alokasi Rp1.196 triliun hanya terkucurkan Rp818 triliun atau 68,2%. "Belanja [APBN] 2022 harus diselesaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (1/12).

Memang, Sri Mulyani berharap realisasi belanja pada tahun ini minimal sama dengan tahun lalu, yakni 96% untuk pemerintah pusat dan 93% untuk belanja daerah.

Dengan demikian, pada bulan terakhir tahun ini pemerintah pusat harus mengucurkan Rp203 triliun, sementara peme-

rintah daerah (pemda) Rp294 triliun. Namun, berkaca pada beratnya tantangan ekonomi pada tahun depan tampaknya pedal gas belanja tak perlu dipacu amat dalam.

Apalagi, inflasi yang menjadi tujuan utama APBN 2022 sejak September lalu terbilang cukup ramah.

Pemerintah memang bisa memacu belanja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Akan tetapi, hal itu berkorelasi pada terbatasnya tumpukan SILPA sehingga mengurangi ketajaman pedang fiskal untuk berperang tahun depan.

Pemangku kebijakan pun bukan kali ini saja memanfaatkan SILPA untuk memenuhi kebutuhan belanja pada tahun selanjutnya sehingga defisit masih dalam batas aman.

Akhir tahun lalu, misalnya, ketika pemerintah memutuskan menghentikan penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.

Alhasil, opsi yang digunakan untuk kebutuhan pembiayaan

APBN 2022, terutama pada awal warsa adalah pemanfaatan SAL.

Fleksibilitas penggunaan SAL yang kian leluasa ini mengindikasikan bahwa otoritas fiskal berupaya untuk tetap menjaga tingkat utang tetap dalam teritorial aman.

Optimalisasi SILPA ini dieksekusi pemerintah sejak tahun pertama pandemi Covid-19. Kala itu, pemerintah menggunakan dana SILPA 2020 senilai Rp139,4 triliun untuk membantu pemenuhan kebutuhan belanja pada 2021.

Adanya SILPA pada saat itu pun tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memastikan penyediaan anggaran dalam kondisi ancaman nyata dan sangat dinamis akibat pandemi Covid-19.

Terbukti, pemanfaatan SILPA itu ampuh untuk menjangkar kebutuhan belanja sembari membatasi lonjakan defisit serta tingkat utang negara.

KONSEKUENSI

Namun demikian, strategi ini memiliki konsekuensi yang tak bisa dibilang ringan untuk perekonomian nasional. Musababnya, tumpukan SILPA bersumber dari penghematan pada pos-pos belanja negara.

Kalangan ekonom pun memandang wajar apabila pemerintah

menghemat belanja untuk menggelembungkan SILPA. Akan tetapi, perlu pengkategorian khusus sehingga langkah itu tidak membebani ekonomi. Misalnya, dengan memangkas atau mengeringkan belanja pada pos yang tidak memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

"Untuk belanja sosial dan belanja modal tetap penting," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, kepada *Bisnis*.

Ketidakpastian ekonomi pada 2023 memang cukup tinggi, akibat belum tuntasnya perang Rusia-Ukraina, tren pengetatan suku bunga acuan oleh bank sentral utama, hingga perlambatan ekonomi China. Namun, masih ada satu kendala yang tak bisa dilonggok enteng, yakni belum berakhirnya penyebaran wabah virus Corona.

Sementara itu, desain fiskal lebih ketat dengan target pertumbuhan ekonomi disasar pada kisaran 5%. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengotak-atik instrumen fiskal.

"Kondisinya pembiayaan akan sangat sulit 2023, mau terbitkan SBN bunganya akan lebih mahal," kata Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira.

Pemerintah memang dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Di satu sisi, fondasi fiskal wajib diperkuat, sedangkan di sisi lain ada hambatan dari sisi proteksi daya beli masyarakat.

Namun, sepanjang ekspektasi inflasi masih dalam takaran, rasanya tidak masalah belanja lebih dihemat sepanjang pos pengiritan tidak memengaruhi konsumsi masyarakat. ■

IRIT-IRIT BELANJA

Irit-irit belanja menjadi salah satu indikasi dari upaya pemerintah untuk menimbun sisa lebih anggaran agar bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Laporan SAL 2021 (Rp Triliun)

Uraian	2021	2020
SAL Awal	388,11	212,69
Penggunaan SAL	(143,96)	(70,64)
SILPA/SILKPA	96,65	245,59
Penyesuaian SAL	(3,03)	0,46
SAL Akhir	337,77	388,11

Saldo Anggaran Lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BISNIS/INTA NOVIZAH